



Akuntansi Sektor Publik

Laporan Keuangan Sektor Publik



Kelompok 9

KELOMPOK 9

Anggota:



Tiara Katrina

2313031059



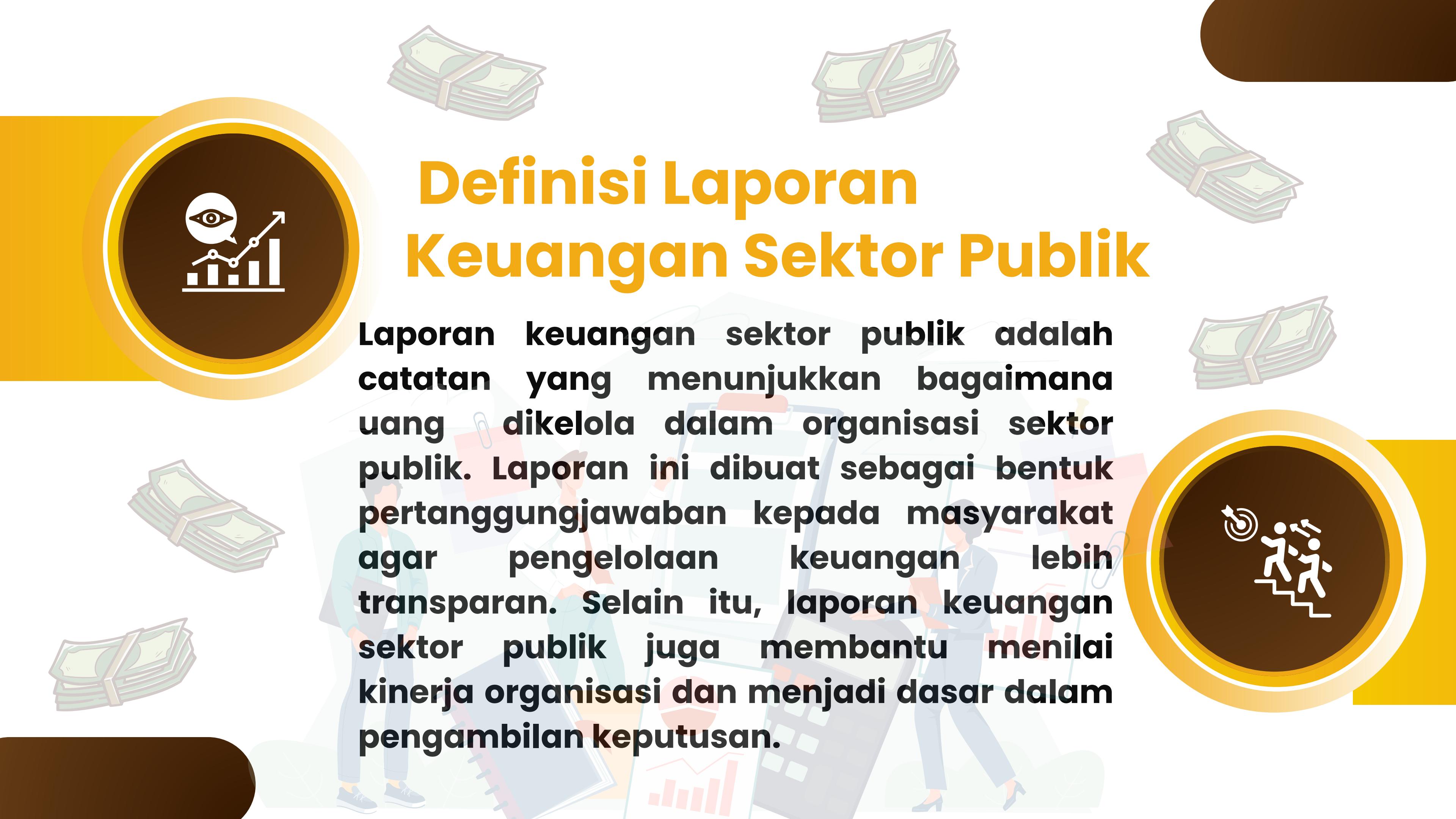
Nazwa Devita Mawarni

2313031071





Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik



Laporan keuangan sektor publik adalah catatan yang menunjukkan bagaimana uang dikelola dalam organisasi sektor publik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat agar pengelolaan keuangan lebih transparan. Selain itu, laporan keuangan sektor publik juga membantu menilai kinerja organisasi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.



Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

1) Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna dan pihak berwenang bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku.

2) Akuntabilitas dan Pelaporan Restrospektif

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus alat untuk memantau kinerja dan menilai manajemen.

3) Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menetukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

4) Hubungan Masyarakat (Humas)

Laporan keuangan berperan sebagai sarana bagi organisasi untuk menyampaikan capaian kinerjanya kepada pemilik, karyawan, masyarakat, serta menjadi media komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Majid, 2019).

5) Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Mahsun dkk. (2011), terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik, yaitu:

- Masyarakat
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
- Pemerintah.



Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Drebin et al. (1981) dalam (Majid, 2019), ada sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik, antara lain:

- 1. Pembayar pajak (tax payers)**
- 2. Pemberi dana bantuan (grantors)**
- 3. Penanam modal**
- 4. Pengguna jasa (penerima layanan berbayar)**
- 5. Karyawan/pegawai**
- 6. Pemasok (vendor)**
- 7. Dewan legislative**
- 8. Manajemen**
- 9. Pemilih (voters)**
- 10. Badan pengawas**

Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu

2) Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan Kinerja Keuangan atau Laporan Surplus-Defisit (sering disebut laporan laba rugi) adalah laporan yang menampilkan informasi mengenai pendapatan dan beban dalam suatu periode tertentu.

Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

3) Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Arus kas biasanya dikelompokkan menjadi tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas investasi.

5) Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan tambahan yang penting bagi pemahaman laporan keuangan.

Hak dan Kebutuhan Pemakai

Laporan Keuangan

Hak Pemakai

1. Hak atas akuntabilitas dan transparansi

Pemakai memiliki hak mengetahui bagaimana pemerintah atau entitas publik menggunakan dana yang dipercayakan kepadanya, termasuk anggaran, realisasi, serta hasil dari penggunaan dana tersebut.

2. Hak atas informasi yang relevan dan andal

Pemakai berhak menerima informasi keuangan yang relevan (bermanfaat untuk pengambilan keputusan) dan andal (dapat dipercaya) sehingga memungkinkan mereka untuk membuat penilaian terhadap entitas publik.

Hak dan Kebutuhan Pemakai

Laporan Keuangan

Hak Pemakai

3. Hak atas pemahaman dan perbandingan

Laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan wajar mengenai aktivitas pemerintah, serta memungkinkan perbandingan antar periode atau antar entitas agar pemakai dapat memantau tren dan kinerja.

4. Hak atas partisipasi atau umpan balik

Meskipun tidak selalu secara langsung dalam laporan keuangan saja, hak partisipasi publik dalam memahami, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap laporan juga merupakan bagian dari hak pemakai dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hak dan Kebutuhan Pemakai

Laporan Keuangan

Kebutuhan Pemakai

- **Kebutuhan untuk menilai kepatuhan anggaran dan realisasi terhadap rencana**
Information about how actual spending and revenues compare to budgeted amounts is key
- **Kebutuhan untuk menilai posisi keuangan, arus kas, dan keberlanjutan**
Pemakai perlu informasi kewajiban, ekuitas, arus kas, serta kewajiban jangka panjang agar bisa menilai kemampuan entitas publik dalam menjalankan pelayanan ke depan.

Hak dan Kebutuhan Pemakai

Laporan Keuangan

Kebutuhan Pemakai

- **Kebutuhan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan hasil kinerja**
Selain aspek keuangan, pemakai membutuhkan informasi kinerja non-keuangan dan hasil pelayanan publik misalnya output, outcome, cost-efficiency.
- **Kebutuhan untuk membuat keputusan atau memberikan masukan kepada entitas public**
Pemakai, terutama legislatif, masyarakat, dan pihak pengawas, memerlukan informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, pengalokasian sumber daya, maupun pengawasan dan kontrol.

Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan

Kebutuhan Pemakai

- **Kebutuhan untuk pengawasan eksternal dan kritik publik**
Karena lembaga publik mengelola dana publik, pemakai publik (citizens) dan lembaga pengawas (oversight bodies) membutuhkan data yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas
- **Implikasi bagi Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik**

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

- **Tujuan Organisasi**

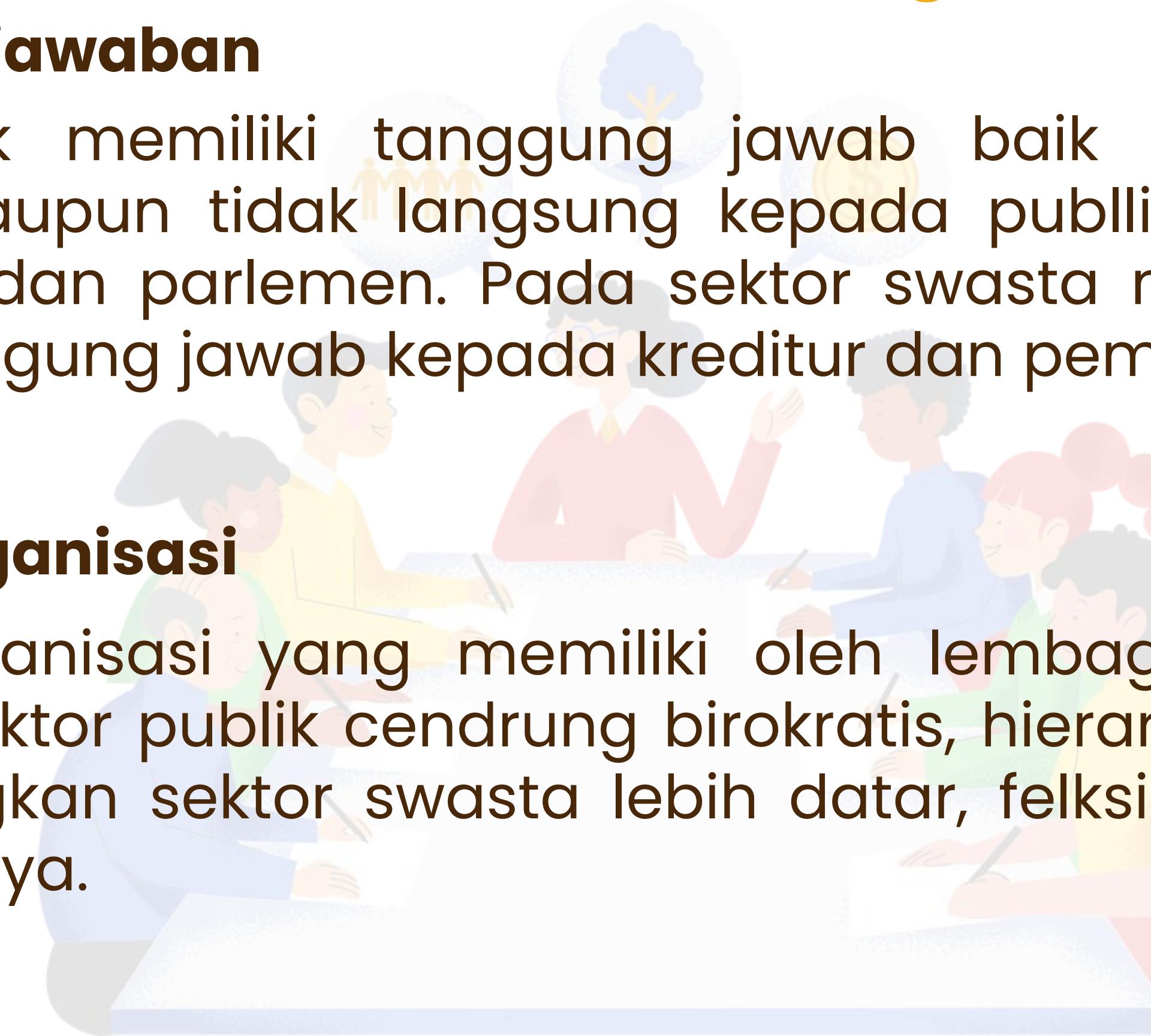
Tujuan Organisasi tidak berorientasi pada keuamtungan semata (nirlaba). Sektor publik memiliki tujuan utama untuk melayani dan memenuhi keinginan dan kebutuhan publik. Sedangkan sektor swasta, mereka memiliki tujuan untuk mencari keuamtungan (profit).

- **Sumber Dana**

Organisasi atau lembaga sektor publik memiliki sumber dana yang berasal dari retribusi daerah, pajak, utang, obligasi pemerintah dan lain-lain. Sedangkan sektor swasta berasal dari modal sendiri, penjualan aktiva, pembiayaan ekternal, laba ditahan dll.

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

- **Pertanggungjawaban**



Sektor publik memiliki tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publlik atau masyarakat dan parlemen. Pada sektor swasta mereka memiliki tanggung jawab kepada kreditur dan pemegang saham.

- **Sktruktur Organisasi**

Sktruktur organisasi yang memiliki oleh lembaga atau organisasi sektor publik cendrung birokratis, hierarkis, dan kaku. Sedangkan sektor swasta lebih datar, felksibel dan lain sebagainya.

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

- **Karakteristik Anggaran**

Anggaran dari sektor publik bersifat terbuka, sedangkan sektor swasta bersifat tertutup dari publik.

- **Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi pada sektor publik biasanya menggunakan beberapa sistem akuntansi seperti cash basis, cash towards accrual, accrual basis. Pada sektor swasta umumnya menggunakan sistem accrual basis.

Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Siklus akuntansi keuangan sektor publik merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis selama satu periode akuntansi.

Tahapan Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik

- 1. Pengenalan dan Analisis Transaksi**
- 2. Pencatatan dalam Jurnal**
- 3. Posting ke Buku Besar**
- 4. Penyusunan Neraca Saldo**
- 5. Penyesuaian dan Koreksi**
- 6. Penyusunan Laporan Keuangan**
- 7. Penutupan dan Pelaporan**



Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Tujuan Siklus Akuntansi Sektor Publik

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan publik.
- Menjamin bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara tertib, efisien, dan efektif.
- Memenuhi kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku (Halim & Kusufi, 2020).

Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik



Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Teknik ini berarti entitas publik menyusun laporan keuangan dengan mengakui transaksi berdasarkan saat hak dan kewajiban muncul, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran vs Realisasi

Teknik ini meliputi penyajian perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi selama periode pelaporan

Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik



Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Komponen Laporan Lengkap

Teknik pelaporan yang baik tidak hanya menyajikan angka utama (neraca, laporan operasional, arus kas) tetapi juga memanfaatkan catatan atas laporan keuangan untuk mengungkapkan asumsi, kebijakan akuntansi, risiko, kontinjensi, dan penjelasan tambahan.

Pelaporan Kinerja dan Non-Keuangan (Output/Outcome)

Terintegrasi

Karena sektor publik selain mengelola keuangan juga menyelenggarakan pelayanan publik, teknik pelaporan semakin menuntut integrasi antara informasi keuangan dan non-keuangan (misalnya output layanan, outcome sosial).

Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pelaporan yang Mudah Diakses dan Dipahami Pemangku Kepentingan

Teknik pelaporan yang baik juga memperhatikan aspek komunikasi: format yang jelas, ringkasan eksekutif, infografik, ringkasan untuk publik (layman's summary), dan publikasi secara daring.

Implikasi dan Hal yang Perlu Diperhatikan

- Entitas publik perlu memastikan konsistensi dan comparability antar periode pelaporan agar pemakai bisa membandingkan kinerja.
- Perlunya sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mendukung teknik-pelaporan seperti akrual, pengungkapan CaLK, serta integrasi data kinerja keuangan dan non-keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan masih ada kendala SDM dan sistem informasi.
- Pentingnya pengendalian internal dan audit eksternal guna menjamin bahwa teknik pelaporan diterapkan secara benar dan laporan keuangan dapat dipercaya.
- Pelaporan keuangan yang baik harus mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dan bukan hanya formalitas administratif.

STUDI KASUS

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut (2018-2022). Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang tinggi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Penerapan sistem akrual di Surabaya dilakukan melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan mulai dari perencanaan anggaran, realisasi, hingga pelaporan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melaporkan transaksi berbasis akrual secara periodik agar konsolidasi data keuangan dapat dilakukan secara real-time oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

STUDI KASUS

Namun, meskipun keberhasilan tersebut signifikan, BPK masih menemukan beberapa catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), antara lain:

- **Masih adanya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang.**
- **Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari beberapa OPD.**
- **Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknik pencatatan akrual penuh dan sistem pelaporan elektronik.**

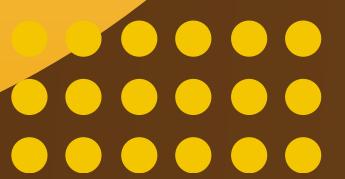
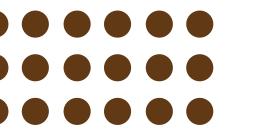
Pemerintah Kota Surabaya kemudian berupaya memperbaiki kelemahan ini melalui pelatihan akuntansi pemerintahan, modernisasi sistem informasi keuangan, serta pembentukan tim monitoring pelaporan keuangan antar-OPD. Kasus ini menggambarkan bagaimana keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memerlukan kombinasi antara komitmen pimpinan daerah, kesiapan SDM, serta dukungan sistem informasi keuangan yang baik. Keberhasilan memperoleh opini WTP bukan semata karena kepatuhan administratif, tetapi juga karena kemampuan entitas pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan transparan

STUDI KASUS

Pertanyaan Studi Kasus

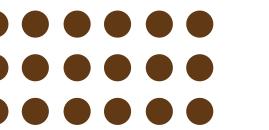
- 1. Jelaskan bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik!**
- 2. Menurut kamu, mengapa beberapa OPD di Pemerintah Kota Surabaya masih mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?**
- 3. Bagaimana peran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan?**

Any Question?





Akuntansi Sektor Publik



Thank You!

FOR YOUR ATTENTION



Kelompok 9

